RENCANA KERJA
2024



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN ASAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan W.R. Supratman No. 13 Kel. Lestari Kec. Kota Kisaran Timur
e-mail : dislh@asahankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 800/1014/LH/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 27 Juli 2023.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN,

RAHMAT HIDAYAT SIREGAR
Pembina Utama Muda
Nip.19710424 199203 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada Tahun 2024 mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka meningkatkan pelayanan pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2024 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN,

RAHMAT HIDAYAT SIREGAR,S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710424 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Asahan 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 7

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 10

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 10

3.2 Tujuan dan Sasaran 10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13

4.1 Program dan Kegiatan 13

BAB V PENUTUP 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Rencana pembangunan tersebut sifatnya berjenjang, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah rencana pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja OPD yang disebut juga Renja–OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asahan tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan sebagai Organisasi Perangkat Daerah, untuk tahun 2023 menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2024. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pengusulan program dan kegiatan tahun 2024 yang merupakan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (lembar Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perancanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41 Tahun 2022 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam melaksanakan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tersusunnya Renja ini adalah tujuan dalam pencapaian Visi dan Misi di bidang Lingkungan Hidup yang tertuang dalam rencana strategis maupun langkah-langkah kegiatan dapat dilaksanakan.
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan selama tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

Bab ini menguraikan tentang capaian kerja OPD tahun lalu, antara lain berisi evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

Berisi tentang penjabaran implementasi dari pernyataan misi dan mengacu pada telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja OPD serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan dan penjabaran dari program dan kegiatan dan prakiraan pendanaan serta rencana kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP;

berisi harapan kepala OPD terhadap pedoman kerja ke depan serta peningkatan pelayanan OPD.

BAB II

EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Asahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari **6** program, **12** kegiatan dan **29** sub-kegiatan. Besaran anggaran yang dikelola adalah sebesar **Rp. 24.732.961.669,00** dan sampai keadaan bulan Desember 2022 yang terealisasi sebesar **Rp. 23.816.575.617,45** atau **96,29 %.** Sisa anggaran sekitar **3,71 %**, dan secara keseluruhan kegiatan tercapai 100 %.

Capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun 2022 dilihat pada capaian indikator kinerja tahun 2022, yaitu :

NO	Indikator	Capaian 2022	Target RPJMD	Persentase (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.04	63.28	102.78
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	57.78	52.70	109.63
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.40	87.33	102.37
4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32.44	36.97	87.74
5	Persentase RTH	10.89	40	27.22

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

Gambaran umum Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan meliputi :

1. Pelayanan di Bidang Tata Lingkungan

Adalah pelayanan terhadap masyarakat terhadap penataan lingkungan yang berkaitan

dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau adalah Area atau jalur dalam kota/wilayah yang penggunaannya bersifat terbuka, area rekreasi bagi penghuni atau masyarakat sekitar dan membantu meningkatkan keindahan serta kualitas lingkungan.

2. Pelayanan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adalah pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan pengangkutan, pengelolaan dan pemanfaatan kembali persampahan konsep 3R (Reuse, Reduce, Recycle) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dalam hal pengumpulan dan pengangkutan limbah B3.

3. Pelayanan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Adalah pelayanan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang berkaitan dengan melakukan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta baku mutu lingkungan, membantu masyarakat dalam melakukan pemantauan sumber pencemaran, penanggulangan pencemaran serta memberikan informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian informasi terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup.

4. Pelayanan di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Adalah pelayanan terhadap masyarakat tentang pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, upaya-upaya turut melestarikan lingkungan hidup, pelayanan kepada pelaku usaha tentang perundang-undangan lingkungan hidup, pelayanan kepada sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tentang upaya turut serta melestarikan lingkungan hidup

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, masih tidak

terlepas dari isu – isu yang memerlukan kecermatan dalam penanggulangannya seperti globalisasi, transparansi, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tingkat pengangguran, kepedulian terhadap lingkungan, kemajuan Ilmu dan Teknologi, kemiskinan, Perlindungan Masyarakat (Konsumen) dan akuntabilitas kinerja aparatur.

Dengan globalisasi dan penggunaan IPTEK yang sangat pesat berkembang, saat ini beberapa isu – isu strategis masih merupakan permasalahan yang tidak boleh terlepas dalam menjalankan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
3. Penanganan sampah belum optimal
4. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Asahan, rancangan awal RKPD sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD bahwa Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan selama 5 (Lima) Tahun Mencakup 10 (sepuluh) program. Adapun program kerja untuk tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD mencakup 10 (sepuluh) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

10. Program Pengelolaan Persampahan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam Musrenbang di Tingkat Kabupaten telah diupayakan untuk ditampung dalam program dan kegiatan Dinas, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tergantung dengan sumber dana yang tersedia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pada sektor Lingkungan Hidup Meningkatnya adalah Meningkatnya beban pencemaran lingkungan dan pengendalian lingkungan hidup sehingga meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Kebijakan dan Strategi pengembangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Asahan diarahkan dengan mengacu kepada visi Pemerintah Kabupaten Asahan tahun 2021 – 2026 yaitu :

"Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"

Dari **visi** tersebut maka **misi** yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;
2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partispasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;
10. **Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;**
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- **Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah ***" Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup"*** *dengan mempertahankan, menjaga, melestraikan, melindungi atau meningkatkan sumber-sumber daya alam yang ada , melalui peningkatan:*

- Indeks Kualitas Air (IKA)
- Indeks Kualitas Udara (IKU)
- Indek Kualitas Lahan (IKL)
- Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,28
			Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,33
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	36,97
			Persentase RTH	40

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Asahan tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026, dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan merencanakan 10 program, 20 kegiatan dan 61 sub-kegiatan, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan kegiatan :

1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Perlatan Rumah Tangga

d. Penyediaan Bahan logistik

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Alat Besar
d. Pengadaan Mebel
e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. **Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**
   a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
   b. Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
   c. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
2. **Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**

a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

b. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

b. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, dan/atau

Penimbunan

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
   1. **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daearah Kabupaten/Kota**
      a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
      b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      c. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
7. **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
   1. **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyulihan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
      a. Pendampingan Gerakan Lingkungan Hidup
      b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup
8. **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
   1. **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
      a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
   1. **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**
      a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota
d. Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
e. Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
f. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
g. Penanganan Sampah melalui Pemprosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
h. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan

2. Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

a. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Koperasi dan perdagangan.

Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kisaran, Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN,

RAHMAT HIDAYAT SIREGAR.S.Sos.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710424 199203 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**17.575.878.521,85**							**17.788.511.165,97**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.420.878.521,85**							**17.632.010.915,97**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17.420.878.521,85**							**17.632.010.915,97**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	-			**100 %**	**11.840.123.942,00**						-	**11.777.825.726,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			7 Dokumen	17.300.565,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	17.550.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.200.565,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		10.300.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		7.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah*	-			12 Bulan	3.105.560.517,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	3.167.671.727,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	3.105.560.517,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		3.167.671.727,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	116.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	117.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	116.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		117.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	384.401.400,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	398.200.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.050.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		49.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	92.450.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		102.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	58.500.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	31.050.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		31.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		10.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	121.350.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		121.500.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			28 Unit	1.812.750.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	1.616.481.059,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	-	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	1.530.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		1.418.860.499,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	85.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		86.050.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	86.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	-	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	111.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		111.570.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*	-			12 Bulan	3.615.775.960,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	3.669.491.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.300.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		1.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	122.082.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		122.507.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		5.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	AKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			IET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.487.293.960,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		3.540.433.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	-			155 unit	2.788.335.500,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		2.791.430.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	220.650.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		221.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	2.515.560.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		2.517.780.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	4.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		4.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	37.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		37.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10.125.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		10.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase rekomendasi hasil kajian yang ditindaklanjuti***	-			**100 %**	**424.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten Kota*	-			1 Dok	200.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokuman	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis*	-			1 Dok	224.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0,00	-	-	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				2 Dokumen	224.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota***	-			**10 %**	**1.712.511.990,00**						-	**1.802.772.700,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Terhadap Sumber*	-			20 Kegiatan	1.364.600.840,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	1.449.091.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	223.500.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		224.500.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	24.100.540,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		24.500.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				18.75 Dokumen	1.117.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		1.200.090.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota*	-			520 Unit	347.911.150,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	353.681.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				5 Laporan	67.350.250,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		68.250.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				25 Titik	280.560.900,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		285.430.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase Ruang Terbuka Hijau***	-			**30 %**	**2.060.070.000,00**						-	**2.100.924.900,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	-			1 Paket	2.060.070.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	2.100.924.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				0 Dokumen	0,00	-	-	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				303,25 Ha	1.555.070.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		1.590.924.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	505.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase pengelolaan B3 yang diawasi***	-			**51 %**	**163.500.000,00**						-	**184.300.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Tersedianya TPS Limbah B3*	-			5 TPS LB3	126.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	126.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	126.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		126.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Tempat Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Kegiatan	37.500.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	37.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	37.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		37.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina***	-			**70 %**	**86.316.500,00**						-	**87.651.280,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Mempunyai Izin Lingkungan dan PPLH*	-			105 Perusahaan	86.316.500,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	87.651.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				28 Dokumen	28.350.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		28.800.580,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				26 Badan Usaha	27.465.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		28.250.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	30.500.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		30.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase SDM Bidang lingkungan yang kompeten***	-			**71 %**	**213.002.000,00**						-	**215.851.250,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan*	-			40 Kali	213.002.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	215.851.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	68.312.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		69.500.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Peleku Usaha/Kegiatan yang terlibat				30 Orang	44.800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		45.100.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				41 Lembaga	99.890.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		101.250.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun***	-			**1 event**	**51.550.500,00**						-	**52.150.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Stoke Holder yang Diberikan Penghargaan lingkungan tingkat Kabupaten/Kota*	-			30 Stokeholder	51.650.500,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	52.150.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				30 Entitas	51.650.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		52.150.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan***	-			**100 %**	**35.160.950,00**						-	**36.771.100,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota*	-			30 Pengaduan	35.160.950,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	36.771.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	17.530.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		18.250.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				15 Perkara	17.630.550,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		18.520.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase cakupan area pelayanan persampahan Tingkat pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta***	-			**76 %** **32 %**	**834.542.639,85**						-	**1.073.763.209,97**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	-			100 %	778.001.889,85			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	1.016.112.449,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	52.350.750,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		52.860.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	25.250.639,85	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		25.700.499,97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				10 Unit	630.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		770.550.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		47.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	47.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		47.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		47.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				91000 Ton	23.400.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		24.500.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				0 Dokumen	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	*Jumlah izin penanganan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta*	-			1 Kegiatan	28.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	28.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.02.0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi				1 Rekomendasi	28.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		28.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Tingkat pengawasan pengelolaan sampah oleh pihak swasta*	-			32 %	28.540.750,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	29.150.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				1 Unit	28.540.750,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		29.150.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X	**NON URUSAN**						**155.000.000,00**							**156.500.250,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**155.000.000,00**							**156.500.250,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	-			**100 %**	**155.000.000,00**						-	**156.500.250,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	-			155 unit	155.000.000,00			-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-	-	156.500.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	155.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	8. Lingkungan Berbasis Partisipatif	-		156.500.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	JUMLAH							**17.575.878.521,85**							**17.788.511.165,97**	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN
TRIWULAN IV - TAHUN 2022

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun Lalu (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun n yang dievaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD pada tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPJMD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																								
	A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan**						**17.187.109.436**		**4.123.151.243**							- 0	4.123.151.243	0,00	24,02	0 0	4.123.151.243	0,00	0,00	DLH
	I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan**						**4.708.263.974**		**1.056.323.830**		**1.245.469.487**		**1.247.431.309**											
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	288 orang	24.934.587.289	46 orang	3.338.830.725	47 orang	4.708.263.974	47 orang	1.056.323.830	47 orang	1.245.469.487	47 orang	1.247.431.309	45 orang	1.007.208.409	186 orang	4.556.433.035	395,74	96,78	232 orang	7.896.263.760	0,00	0,00	DLH
	II	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**180.460.125**		-		**179.657.000**		-											
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disdakan	6 paket	749.960.125	1 paket		1 paket	180.460.125	0 paket	-	1 paket	179.657.000	paket	-	paket	-	1 paket	179.657.000	100,00	99,55	2 paket	179.657.000	33,33	23,96	DLH
	III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan**						**483.437.586**		**87.905.450**		**86.908.349**		**108.444.059**		**146.033.586**									
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instalasi	6 paket	136.483.635	1 paket	23.120.000	1 paket	21.998.070	0 paket	-	1 paket	11.617.650	paket		paket	5.618.050	1 paket	17.233.700	100,00	78,34	2 paket	40.353.700	33,33	29,57	DLH
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	288.400.811	1 paket	44.747.000	1 paket	47.886.750	0 paket	15.955.300	1 paket	15.953.300	1 paket	- 11.450	1 paket	15.945.600	3 paket	47.842.750	300,00	99,91	4 paket	92.589.750	66,67	32,10	DLH
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	487.415.980	1 paket	8.129.000	1 paket	50.858.503	1 paket	47.686.100	- paket	-	1 paket	3.125.900	paket	-	2 paket	50.812.000	200,00	99,91	3 paket	58.941.000	50,00	12,09	DLH
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	325.556.100	1 Paket	23.525.000	1 Paket	77.286.000	1 Paket	5.965.750	1 Paket	9.170.450	1 Paket	5.811.450	1 Paket	39.374.250	4 Paket	80.321.900	400,00	78,05	5 Paket	83.846.900	83,33	25,75	DLH
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	176.362.964	1 paket	20.557.250	1 paket	37.125.263	1 paket	667.500	1 paket	13.594.626	1 paket	6.452.518	1 paket	5.570.900	4 paket	26.305.544	400,00	70,86	5 paket	46.862.794	83,33	26,57	DLH
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dok	61.219.054	1 Dok	9.945.000	1 Dok	9.639.000	1 Dok	3.240.000	1 Dok	6.189.000	Dok	-	Dok	-	2 Dok	9.429.000	200,00	97,82	3 Dok	19.374.000	300,00	31,65	DLH
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Laporan	752.233.250	2 Laporan	69.165.200	67 Laporan	218.644.000	5 Laporan	14.370.800	15 Laporan	30.473.323	27 Laporan	93.065.641	20 Laporan	79.526.786	67 Laporan	217.436.550	100,00	99,45	69 Laporan	286.601.750	16,43	36,10	DLH
	IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Tersedianya Barang Milik Daerah**						**1.686.325.063**		**1.552.100.000**		**80.700.000**		-		**46.550.000**									
	1	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1.552.500.000	0 unit	-	1 unit	1.552.500.000	1 unit	1.552.100.000	- unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	1.552.100.000	100,00	99,97	1 unit	1.552.100.000	100,00	99,97	DLH
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 unit	677.873.078	10 unit	75.753.400	13 unit	133.825.063	0 unit	-	9 unit	80.700.000	unit	-	4 unit	46.550.000	13 unit	127.250.000	100,00	95,09	23 unit	203.003.400	67,65	29,95	DLH

V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**									**6.063.762.038**		**1.009.578.894**		**1.503.402.047**			**1.502.581.307**			**2.011.804.504**	-	0	6.027.166.752	0,00	99,40	0	0	6.027.166.752	0,00	0,00	DLH
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2025 laporan	8.600.000	460		1.020.000	510	laporan	1.200.000	## Laporan	500.000	lapora n	-	laporan	-	laporan	700.000	313	laporan	1.200.000	61,37	100,00	793	laporan	2.220.000	34,11	25,81	DLH
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	608.149.577	2		103.068.670	2	Lapora n	140.998.236	0 Laporan	43.704.173	- Lapor an	31.485.719	2 Laporan	33.927.029	Laporan	31.764.508	2	Laporan	140.881.429	100,00	99,92	4	Laporan	243.950.099	33,33	40,11	DLH
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	18.568.917.259	1		76.760.000	5	Lapora n	5.921.563.802	1 Laporan	965.374.721	- Lapor an	1.471.916.328	5 Laporan	1.468.654.278	Laporan	1.979.139.996	6	Laporan	5.885.085.323	120,00	99,38	7	Laporan	5.961.835.323	23,33	32,11	DLH
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang**								**4.064.960.650**		**417.243.066**		**901.589.939**		**694.156.258**		**1.734.836.052**	-	0	4.047.805.218	0,00	99,58	0	0	4.047.805.218	0,00	0,00	DLH
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	148 unit	1.299.542.815	0		-	25	unit	269.143.200	6 Unit	10.943.469	**6 Unit**	**78.804.389**	unit	**32.144.408**	unit	141.459.603	12	unit	261.051.869	48,00	96,99	12	unit	261.051.869	8,11	20,09	DLH
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 unit	2.530.063.400	44		2.746.845.012	68	unit	3.522.175.450	5 Unit	401.049.600	8 Unit	814.385.450	unit	956.331.850	unit	1.342.886.449	13	unit	3.514.663.349	19,12	99,79	57	unit	6.281.498.361	93,44	247,48	DLH
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	345 unit	217.840.100	23		25.630.000	25	unit	36.550.000	6 Unit	5.250.000	6 Unit	10.680.000	unit	5.680.000	unit	14.890.000	12	unit	36.500.000	46,15	99,86	35	unit	62.130.000	10,14	28,55	DLH
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.621.742.800	2		750.814.500	2	unit	236.992.000	0 Unit	-	- Unit	-	unit	-	unit	235.600.000	-	unit	235.600.000	0,00	99,41	2	unit	986.414.500	100,00	60,82	DLH
									Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													**140,86**	**94,96**				**66,88**	**47,33**	
									Predikat Kinerja													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sedang**	**Sangat Rendah**		
B	**PROGRAM PENGENDALIAN**	**Persentase Penurunan**								**4.035.677.572**		**149.708.725**		**171.004.740**		**2.626.466.422**		**798.064.911**	-	0	3.745.294.798	0,00	92,80	0	0	3.745.294.798	0,00	0,00	DLH
I	**Pencegahan Pencemaran**	**Cakupan Pencegahan**								**4.001.810.177**		**149.708.725**		**164.894.040**		**2.609.551.297**		**791.927.711**	-	0	3.715.081.773	0,00	92,84	0	0	3.715.081.773	0,00	0,00	DLH
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara , dan Laut	15 Dok	1.093.104.200	3		14.766.355	3	Dok	1.584.838.332	0 Dok	400.000	# Dokum	-	3 Dok	1.372.142.532	Dok	105.112.529	3	Dok	1.477.655.061	100,00	93,24	6	Dok	1.462.421.416	40,00	136,53	DLH
	2 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	#### Parame ter	9.309.058.254	###		3.031.909.447	###	Param eter	2.416.971.845	## Paramete	149.308.725	## Param-	164.894.040	Paramet er	1.236.408.765	Parameter	686.815.182	1.000	Parameter	2.237.426.712	5,54	92,57	18225	Parameter	5.269.336.159	19,68	58,60	DLH
II	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota**								**33.867.395**		-		**6.110.700**		**17.945.125**		**6.157.200**											
	1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	30 Laporan	389.680.247	5		38.059.200	5	Lapora n	33.867.395	0 Laporan	-	# Lapora	6.110.700	5 Laporan	17.945.125	Laporan	6.157.200	5	Laporan	30.213.025	100,00	89,21	10	Laporan	68.272.225	33,33	17,52	DLH
	2 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	125 titik	288.500.955	0		-	25	titik	-	0 Titik	-		-		-		-	-	titik	-	0,00	0,00	0	titik	-	0,00	0,00	DLH
									Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													**51,39**	**68,75**				**23,26**	**52,66**	DLH
									Predikat Kinerja													**Rendah**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Rendah**	

	C	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**								**2.408.283.550**		**46.861.500**		**278.303.600**		**240.684.615**		**1.551.819.152**	-	0	2.117.668.867	0,00	87,93							
		I **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								2.408.283.550		**46.861.500**		**278.303.600**		**240.684.615**		**1.551.819.152**	-	0	2.117.668.867	0,00	87,93							
		1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Paket	7.895.209.500	0		-	15	Paket	2.408.283.550	1 Paket	46.861.500	1 Paket	278.303.600	Paket	240.684.615	Paket	1.551.819.152	2	Paket	2.117.668.867	13,33	87,93	2 Paket	2.117.668.867	2,67	27,52	DLH		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													**13,33**	**87,93**			**2,67**	**27,52**			
										Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
	D	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH**	**Persentase Pengelolaan B3 yang diawasi**								**27.523.000**		-																		
		I **Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah**	**Tersedianya TPS Limbah B3**								27.523.000		-																		
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dok	185.437.100	0		-	1	Dok	27.523.000	0 Dokumen	-		-	1 Dok	4.956.200	Dok	19.939.400	1	Dok	24.895.600	100,00	90,45	1 Dok	24.895.600	100,00	13,43	DLH		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													**33,33**	**90,15**			**25,00**	**3,36**	DLH		
										Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
	E	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina								-		-																		
		I **Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Mempunyai Izin Lingkungan dan PPLH**								-		-																		
		1 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Orang	30.700.000	0		-	1	Orang	-	0 Orang	-		-		-		-	-	Orang	-	0,00	0,00	0 Orang	-	0,00	0,00	DLH		
										Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**			
										Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			

	F	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup yang kompeten**								**133.653.905**		-																	
	I	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan								133.653.905		-																	
		1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	408 lembaga	489.177.050	0		-	41	lembaga	103.331.405	0 lembaga	-	# lembaga	1.980.300	lembaga	12.248.100	41 lembaga	73.227.500	41 lembaga	87.465.900	100,00	84,65	41 Kasus	87.465.900	10,05	17,88	DLH
		2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Keg	399.008.505	1		8.539.000	2	Keg	30.322.500	0 Keg	-	1 Keg	8.075.000	Keg	-	Keg	-	1 Keg	8.075.000	50,00	26,63	2 Kasus	16.614.000	16,67	4,16	DLH
																						75,00	**55,64**			**13,36**	**11,02**	
																						Sedang	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
	G	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase cakupan area pelayanan persampahan**								**833.751.578**		**1.757.000**																
	I	**Pengelolaan Sampah**	Persentase Pengelolaan Sampah								833.751.578		**1.757.000**																
		1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan**	1 dokumen	100.000.000			-	1	dokumen	100.000.000	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	1 dokumen	98.040.750	1 dok	98.040.750	100,00	98,04	1 dok	98.040.750	100,00	98,04	DLH
		2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	30 Laporan	382.041.100	5		56.560.000	5	Laporan	728.982.828	0 Laporan	-	# Laporan	-	5 Laporan	350.424.600	Laporan	368.647.053	5 Laporan	719.071.653	100,00	98,91	10 Laporan	775.631.653	33,33	203,02	DLH
		3 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 orang	53.240.650				30	orang	106.768.750	0 orang	1.757.000	# Orang	-	30 orang	81.368.000	orang	13.096.000	30 orang	96.219.000	100,00	90,12	30 orang	96.219.000	100,00	180,72	DLH
																						100,00	**95,69**			**77,78**	**160,89**	
																						Sangat Tinggi	**92,90**			**Tinggi**	**Sangat Tinggi**	
																						58,13	**61,80**			**28,94**	**43,21**	
																						Rendah	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

Kisaran, 9 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ASAHAN

RAHMAT HIDAYAT SIREGAR, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710424 199203 1 001

Kisaran, Januari 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. ZAINAL ARIPIN SINAGA, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670307 199303 1 010